

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Program	Tolok Ukur Program				Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan				Langkah aksi	Jadwal Pelaksanaan				Penanggungjawab
			I	II	III	IV		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja dan anggaran Tahun 2020			Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan anggaran Tahun 2020			I	II	III	IV	
										Kinerja	Anggaran				Kinerja	Anggaran						
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				WTP														Kepala BPKAD		
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	92	864.553.800										Kepala Bidang Perbendaharaan		
											Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah system yang dikelola	system	1	331.028.550	1. Input SPD, 2. Input SP2D, 3. Register SPP,SPM,SP2D, 4. Validasi SP2D, Daftar rekapitulasi dan Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, 5. Laporan realisasi penerbitan SP2D, 6. Laporan rekapitulasi transaksi harian.					Kasubid Belanja dan Pembiayaan	
											Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	315.780.250	1. Penerbitan SPD, 2. Verifikasi SPM, 3. Penerbitan SP2D, 4. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran harian, 5. Membuat laporan poisisi kas daerah harian, 6. Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran bulanan, 7. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi, 8. Verifikasi Daftar Transaksi Harian, 9. Menyusun RTH, 10. Melaporkan DTH dan RTH ke KPP, 11. Penyusunan Buku Kas Umum Daerah.					Kasubid Pengelolaan Dana	
											Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	56	217.745.000	Workshop verifikasi dokumen pencairan					Kasubid Belanja dan Pembiayaan	
							Tingkat Ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	90	883.652.100										Kepala Bidang Akuntansi		

										Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1	93.750.000	1. Melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan dan Rekonsiliasi Belanja Akhir Tahun untuk LKPD 2019, 2. Melaksanakan Rekonsiliasi Saldo Awal Neraca, Rekonsiliasi Persediaan, dan Rekonsiliasi Neraca untuk LKPD 2019, 3. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Operasional untuk LKPD 2019, 4. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Perbandingan LRA dan LO T.A 2019, 5. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya T.A 2019, 6. Melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan Unaudited LKPD 2019, 7. Menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited T.A 2019 ke inspektorat untuk di review : - Membuat dan menyampaikan Surat Pengantar Review, - Membahas Hasil Review, - Merevisi Laporan Keuangan Unaudited TA 2019 berdasarkan hasil Review, 8. Membuat Analisis Vertikal dan Horizontal terhadap nilai-nilai dalam Laporan Keuangan					Kasubid Pelaporan
										Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda, Raperbup	1	212.602.100	1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, 2. Penyampaian Dokumen					Kasubid Pelaporan
										Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Sistem	1	75.000.000	1. Melaksanakan Rapat Intern dalam rangka pekerjaan pengembangan sistem aplikasi, 2. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak ketiga tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, 3. Melakukan kerjasama dan pendampingan dengan pihak ketiga dalam pekerjaan pengembangan sistem aplikasi, 4. Penerapan Sistem Aplikasi					Kasubid Evaluasi dan Pengembangan

										Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti pembinaan	SKPD	56	315.150.000	1. Survey lokasi Pelaksanaan Kegiatan, 2. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, 3. Pelaksanaan Kegiatan, 4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam Pelaksanaan workshop Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah, 5. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, 6. Pelaksanaan Kegiatan workshop Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah, 7. Menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam Pelaksanaan workshop Percepatan Penyusunan LKPD TA. 2020, 8. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, 9. Pelaksanaan Kegiatan workshop workshop Percepatan Penyusunan LKPD TA. 2020					Kasubid Evaluasi dan Pengembangan	
										Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	Dokumen	24	187.150.000	1. Menerima Surat Permohonan Register Pengesahan UP/GU/TU dari SKPD TA 2020, 2. Melakukan Register Pengesahan Belanja Langsung baik secara manual maupun SIPKD TA 2020, 3. Melakukan Register SPJ Belanja Fungsional TA 2020, 4. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD Bulanan TA 2020, 5. Penyusunan Konsolidasi Laporan Realisasi APBD Bulanan TA 2020, 6. Melakukan pengiriman LRA Bulanan ke Kemendagri, Kemenkeu, BPS, BKAD Provinsi Jabar, DJPK, dan KPPN.					Kasubid Pelaporan	
									Keakuratan Penatausahaan aset (materialitas)	Persen	88	1.111.460.015									Kepala Bidang Aset
										Penyusunan RKBMD dan RKPBM	RKBMD dan RKPBM	Dokumen	2	37.500.000	1. membuat surat edaran dan dibagikan kepada setiap SKPD mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016, 2. merekap hasil usulan dari setiap SKPD, 3. melaporkan dan mengajukan ke kepala Bidang aset dan Pelaporan					Kasubid Perencanaan Aset	

																					Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Paket	1	197.500.000	1. Persiapan, Pembentukan Tim Sekaligus Tanah mana yang akan diproses pengamanan untuk dipasang plang maupun Patok, 2. Survey lokasi yang akan di pasang, melaporkan ke kepala Bidang mana saja yang akan dilaksanakan proses Pengamanan, 3. mempersiapkan spek dan kuantitas yang akan di buat plang dan tanda batas dan proses pengadaan barang, 4. Pelaksanaan peendampingan Pemasangan plang dan tanda batas, Dokumentasi dan Pelaporan						Kasubid Perencanaan Aset		
																						Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi	SKPD	55	107.120.000	Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD membawa 2 rangkap Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah di tanda tangan oleh Kepala SKPD, Pejabat Pemanfaatan BMD dan Petugas Akuntansi ke Bidang Aset. 2). BA Rekonsiliasi Aset beserta lampiran diperiksa oleh pemroses dengan mencocokkan data dan angka pada dokumen-dokumen pendukungnya pada lampiran dengan data yang ada di aplikasi SIMDA BMD. 3). Apabila data dan dokumen sudah sesuai dengan aplikasi SIMDA BMD, maka Berita Acara Rekonsiliasi Aset diverifikasi dan diparaf oleh Kasubid Penatausahaan Aset untuk ditandatangani oleh Kabid Aset. 5). BA Rekonsiliasi Aset beserta berkas pendukungnya dikembalikan ke SKPD 1 rangkap dan 1 rangkap lagi diarsipkan oleh pemroses. Apabila berkas Rekonsiliasi Aset belum							Kasubid Pelaporan Aset
																						Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimtek	SKPD	55	107.425.265	1). Pembentukan Tim Teknis, 2). Pendataan Peserta, 3). Penyusunan Materi dan Narasumber, 4). Koordinasi dengan Pihak ke 3 selaku penyelenggara acara, 5). Pelaksanaan Bimtek, dan 6). Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Bimtek						Kasubid Pelaporan Aset	

										Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Raperda, Raperbup	1	335.933.875	1. Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A. 2019 oleh TAPD, 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2019 kepada DPRD, 3. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD T.A. 2019 antara Bupati dengan DPRD, 4. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD T.A. 2019 berdasarkan hasil pembahasan,					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
										Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	Raperda, Raperbup	1	378.760.000	1. Pembahasan Raperda APBD oleh TAPD, 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, 3. Pembahasan Raperda APBD T.A. 2021 antara Bupati dengan DPRD, 4. Penyusunan Raperda APBD berdasarkan hasil pembahasan,					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
										Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Dokumen	2	326.882.350	1. Pengolahan dan pengumpulan data, 2. Rapat Pembahasan oleh TAPD, 3. TAPD menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 kepada Bupati, 4. Bupati menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 kepada DPRD, 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 antara Bupati dengan DPRD, 6. Melakukan Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD atas Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020, 7. Penandatanganan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
										Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan Keuangan Daerah	Raperbup/ Rakepbup/ Raperda	3	350.854.600	1. Pengumpulan bahan data penyusunan kebijakan keuangan daerah, 2. Penyusunan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, dan Rancangan Rakepbup, 3. Pembahasan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, dan Rancangan Rakepbup, 4. Penyampaian Rancangan Perda, Rancangan Perbup, dan Rancangan Rakepbup ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sumedang					Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran

										Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	SKPD	55	428.826.200	1. FGD Perencanaan Penyusunan Anggaran internal BPKAD				Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran
										Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Hasil Evaluasi	Dokumen	2	439.795.600	1. Mengumpulkan bahan data untuk evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda tentang APBD, 2. Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat terkait Evaluasi Raperda tentang APBD, 3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis berkenaan dengan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur, 4. Melaksanakan penyempurnaan Raperda tentang APBD terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat (rapat TAPD dan Banggar DPRD), 5. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Dewan terkait Kepim DPRD, 6. Menyampaikan Kepim DPRD kepada Gubernur Jawa Barat, 7. Penetapan Perda tentang APBD setelah kepim DPRD ditetapkan dan sebelum 31 Desember, 8. Menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur				Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



UUS SUNDAWAN, SE., MM
Pembina Utama Muda/ Ivc
NIP. 19601023 198302 1 001